



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar Pelayanan Usulan Alokasi Bantuan Pembangunan RKB PAUD

No. SK : 890/325/DISDIKBUD/2024

Persyaratan

1. Data Sarana Prasarana dalam DAPODIK;
2. Data Rombel dalam DAPODIK
3. Dokumen Pengajuan Usulan Pembangunan Sarana Prasana : -Permohonan / Proposal Usulan Sarana Prasarana (Pembangunan RKB) lengkap dengan foto dokumentasi lahan tersedia; - Akte/Surat Keterangan Status Kepemilikan Tanah/ Yayasan/Lembaga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. 1. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN a. Dinas pendidikan memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik; b. Data-data yang dimutakhirkan meliputi: - data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan; - data sarana pendidikan (termasuk buku, TIK, APE, dan lainnya); dan - ketersediaan lahan (total luasan lahan, luas lahan tersedia untuk pembangunan). c. Satuan Pendidikan melakukan Pemutakhiran Data Rombel dalam DAPODIK; d. Satuan Pendidikan mengajukan Permohonan / Proposal Usulan Sarana Prasarana (Pembangunan RKB) lengkap dengan foto dokumentasi lahan tersedia dan Surat keterangan kepemilikan lahan berupa Akte/ Surat Keterangan Status Kepemilikan Tanah; e. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pemantauan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana Prasarana pada DAPODIK; f. Buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh (download) pada laman <https://eplanning.kemdikbud.go.id/ringkaspanduansarpras2024> g. Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menentukan daftar Calon Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan ditahun depan; h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten bersama dengan Bapperida dengan kewenangannya melakukan verifikasi awal terkait bantuan DAK sarpras bidang pendidikan dalam sistem aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran); i. Dinas Pendidikan dengan kewenangannya melakukan verifikasi lapangan terhadap Calon Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Pembangunan RKB tersebut dengan melaksanakan cek lapangan dan skala prioritas (kelengkapan dokumen, ketersediaan lahan, dsb); j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuat Usulan/Daftar Penerima Bantuan Pembangunan RKB melalui aplikasi KRISNA dengan menyesuaikan Pagu Anggaran yang tersedia; k. Disdikbud, Bapperida dan DPKPAD Kabupaten memasukkan anggaran usulan yang sudah disetujui kedalam DIPA Kabupaten tahun berikutnya.

2. 2. DANA ALOKASI UMUM (DAU-APBD) a. Dinas pendidikan memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dapodik; b. Data-data yang dimutakhirkan meliputi: - data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan; - data sarana pendidikan (termasuk buku, TIK, APE, dan lainnya); dan - ketersediaan lahan (total luasan lahan, luas lahan tersedia untuk pembangunan). c. Satuan Pendidikan melakukan Pemutakhiran Data Rombel dalam DAPODIK; d. Satuan Pendidikan mengajukan Permohonan / Proposal Usulan Sarana Prasarana (Pembangunan RKB) lengkap dengan foto dokumentasi lahan tersedia dan Surat keterangan kepemilikan lahan berupa Akte/ Surat Keterangan Status Kepemilikan Tanah; e. Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pemantauan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana Prasarana pada DAPODIK; f. Buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh (download) pada laman <https://eplanning.kemdikbud.go.id/ringkaspanduansarpras2024> g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menentukan daftar Calon Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU-APBD) ditahun depan yang tidak dapat tertampung dalam DAK Fisik Bidang Pendidikan; h. Dinas Pendidikan dengan kewenangannya melakukan verifikasi lapangan terhadap Calon Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Pembangunan RKB tersebut dengan melaksanakan cek lapangan dan skala prioritas (kelengkapan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Komplek Perkantoran Payaloting 22798 081269941549

-

Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

0

Berkas pelayanan diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen pengajuan pengusulan pengadaan sarana prasarana (Pembangunan RKB)

Pengaduan Layanan

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung disampaikan ke Bidang yang bersangkutan (Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar yang akan didelegasikan ke Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas)